PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN NGANJUK

Jl. Dermojoyo No. 21 TELP. (0358) 321746 Nganjuk

N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 96 /K/411.509/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN NGANJUK
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026, Indikator Kinerja Individu di lingkungan Kecamatan Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonedia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2019;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN NGANJUK TAHUN 2024 – 2026

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Individu di lingkungan Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atau tingkat pencapaian atas kinerja individu dari sasaran yang harus dicapai dan/atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Camat;
2. Indikator Kinerja Sekretaris;
3. Indikator Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Indikator Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
5. Indikator Kinerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

6. Indikator Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Indikator Kinerja Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum;
8. Indikator Kinerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
9. Indikator Kinerja Pengadministrasi Keuangan;
10. Indikator Kinerja Pengadministrasi Umum;
11. Indikator Kinerja Pengadministrasi Kepegawaian;
12. Indikator Kinerja Pengadministrasi Kependudukan;
13. Indikator Kinerja Pengadministrasi Pemerintahan.
14. Indikator Kinerja Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, Pelaksana yang ada di 13 Kelurahan

KEEMPAT : Indikator Kinerja Individu dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 22 Desember 2023
an. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : CAMAT NGANJUK

Tugas :
a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretariat, Kasubag Umum dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan

			"Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik?" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kecamatan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM ialah dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan		Penanggungjawab Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap		

			tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat Desa

			pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan kecamatan. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	a. Konsep : • Pembinaan Pemerintahan Desa : Memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. • Pengawasan Pemerintahan Desa: Melibatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan dan keputusan pemerintahan desa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan b. Definisi Operasional • Melibatkan penyelenggaraan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya untuk memperkuat kapasitas pemerintahan desa. • Melibatkan audit internal, evaluasi kinerja, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur hasil pembinaan dan efektivitas pengawasan d. Manfaat IKM • Pembinaan dapat meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial pemerintahan desa. • Pengawasan yang baik dapat membantu mencegah		Ka Sie Binwas

			dan mendeteksi tindakan korupsi. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. e. Cara Pengumpulan Data • Penggunaan kuesioner untuk mendapatkan pandangan luas dari masyarakat terkait kinerja pemerintahan desa. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Pengumpulan data dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau tahunan, tergantung pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia		

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : SEKRETARIS KECAMATAN NGANJUK

Tugas : Melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Fungsi :
a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pelaksanaan program dan evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Kecamatan yang disusun dengan baik	a. Konsep : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang disusun meliputi Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan, LPPD dan LKJIP disusun tepat waktu dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Formulasi Perhitungan : $\text{Persentase laporan Keuangan} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$ c. Manfaat : • Membantu menilai efisiensi penggunaan anggaran.	Rekapitulasi Laporan Program Kecamatan Nganjuk	Sekretaris Kecamatan

			• Memberikan gambaran pencapaian target kinerja kecamatan. • Mendukung pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan. d. Cara Pengumpulan Data : • Data Laporan Keuangan dapat diperoleh dari sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah. • Data Laporan Kinerja Kecamatan dapat diperoleh melalui evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. • Penggunaan wawancara, survei, dan observasi dapat membantu pengumpulan data yang lebih mendalam. e. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : • Persentase Pencapaian Target Laporan Kinerja Kecamatan ialah secara periodik, yakni setiap triwulan atau tahunan		
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi, kepegawaian dan surat menyurat	Persentase pegawai yang puas terhadap epelayanan administrasi, kepegawaian dan surat menyurat	a. Konsep : • Fokus pada kepuasan pegawai terkait dengan layanan administrasi, kepegawaian, dan surat menyurat di lingkungan kerja. b. Formulasi Perhitungan : • Kepuasan terhadap pelayanan administrasi, kepegawian dan surat menyurat diukur melalui Survei Kepuasan Pegawai dengan metode yang sederhana, memilih antara "PUAS" dan	Laporan SKM pelayanan administrasi, kepegawaian dan surat menyurat	

			"TIDAK PUAS". c. Manfaat : • Perbaikan Layanan: Identifikasi area di mana kepuasan rendah untuk meningkatkan layanan. • Kesejahteraan Pegawai: Meningkatkan kepuasan dapat berdampak positif pada kesejahteraan dan produktivitas pegawai. d. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Melakukan survei secara berkala, yakni setiap enam bulan atau setahun sekali, untuk memantau perubahan.		
3.	Meningkatnya pengelolaan kerumahtanggaan untuk mendukung kelancaran tugas – tugas perkantoran	Persenrase sarana dan prasarana perkantoran yang layak fungsi	a. Konsep : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang layak fungsi merujuk pada sejauh mana fasilitas dan infrastruktur kantor memenuhi standar atau persyaratan tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi kantor dengan efektif. b. Formulasi Perhitungan : Sarana perkantoran meliputi Gedung kantor, peralatan kantor, dan perlengakpan kantor. Berdasarkan pengelolaan barang milik daerah yang layak fungsi adalah dalam kondisi baik dan rusak ringan/sedang. c. Manfaat : • Menilai efisiensi dan efektivitas sarana dan prasarana perkantoran.	Kartu Inventaris Barang dan Ruangan	

			• Menyediakan pemahaman yang jelas tentang sejauh mana kebutuhan kantor dipenuhi. • Menyediakan dasar untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur kantor.		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
SEKRETARIS KECAMATAN NGANJUK

Drs. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si.
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas : Melaksanakan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Fungsi :
a. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pelaksanaan program dan anggaran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan yang disusun dengan baik	a. Konsep : Laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan adalah instrumen penting dalam mengukur kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Konsep dasar dari laporan tersebut adalah menyajikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai keuangan dan kinerja Kecamatan. b. Formulasi Perhitungan : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang disusun meliputi Laporan Keuangan Tribulan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan LPPD dan LKjIP disusun tepat waktu dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Rekapitulasi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	

			c. Manfaat : • Evaluasi efisiensi penggunaan anggaran. • Identifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. • Mendukung perencanaan jangka panjang dan peningkatan kinerja Kecamatan.		

Mengetahui :
SEKRETARIS KECAMATAN NGANJUK

Drs. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si.
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

MAYA DEVIANTI DYAH PANCARI, SE, M.AP.
Penata
NIP. 19741231 201408 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tugas : Melaksanakan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Fungsi :
a. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pelaksanaan program dan anggaran Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan yang disusun dengan baik	a. Konsep : Laporan keuangan dan laporan kinerja Kecamatan adalah instrumen penting dalam mengukur kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Konsep dasar dari laporan tersebut adalah menyajikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai keuangan dan kinerja Kecamatan. b. Formulasi Perhitungan : Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang disusun meliputi Laporan Keuangan Tribulan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Tahunan LPPD dan LKjIP disusun tepat waktu dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.	Rekapitulasi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan	

			c. Manfaat : • Evaluasi efisiensi penggunaan anggaran. • Identifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. • Mendukung perencanaan jangka panjang dan peningkatan kinerja Kecamatan.		

Mengetahui :
SEKRETARIS KECAMATAN NGANJUK

Drs. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si.
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

MAYA DEVIANTI DYAH PANCARI, SE, M.AP.
Penata
NIP. 19741231 201408 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas : Melaksanakan pelayanan administrasi, kepegawaian dan surat menyurat.

Fungsi :
a. Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas hubungan kemasyarakatan;
d. Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang - undangan; dan
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi, kepegawaian dan surat menyurat	Jumlah surat yang diproses dengan baik	a. Konsep : Mengacu pada jumlah surat atau dokumen yang berhasil diolah atau dikelola dengan efektif dan efisien. Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti penerimaan, pengolahan, dan pengiriman surat dengan memastikan bahwa semua langkah-langkah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. b. Formulasi Perhitungan : Pelayanan surat menyurat meliputi pengagendaan surat masuk dan/atau surat keluar, pendistribusian surat, pengarsipan surat dan pendokumentasian surat dengan baik.	Buku Register Surat	

			c. Manfaat : • Memantau jumlah surat yang diproses dengan baik dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasionalnya. • Menjamin bahwa surat diproses dengan baik dapat meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan atau pihak yang terlibat. • Membantu dalam memastikan bahwa prosedur-prosedur yang ditetapkan diikuti dengan baik. • Memberikan indikator kinerja untuk departemen atau individu yang terlibat dalam pengelolaan surat.		
		Jumlah pelayanan kepegawaian yang diproses dengan baik	a. Formulasi Perhitungan : Pelayanan kepegawiaan adalah pelayanan yang diberikan kepada seluruh pegawai kecamatan meliputi Administrasi Gaji, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Pensiun serta Cuti. b. Manfaat : • Mengetahui jumlah pelayanan kepegawaian yang diproses dengan baik memiliki manfaat strategis bagi organisasi. Manfaatnya dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional, kepuasan pengguna yang lebih tinggi, dan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja sistem kepegawaian.	Data Pelayanan Kepegawaian	
2.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang layak fungsi	a. Formulasi Perhitungan : Sarana perkantoran meliputi Gedung kantor, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor. Berdasarkan pengelolaan barang milik daerah yang layak fungsi adalah dalam kondisi baik dan rusak ringan/sedang.	Kartu Inventaris Barang dan Ruangan	

			b. Manfaat : • Evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. • Identifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. • Mendukung perencanaan jangka panjang dan peningkatan infrastruktur kantor.		

Mengetahui :
SEKRETARIS KECAMATAN NGANJUK

Drs. AGUS PUJI SANTOSO, M.Si.
Pembina
NIP. 19690412 199403 1 013

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUPRIADI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19730518 199703 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat

Fungsi :
a. Pemberian dorongan pertisipassi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseleruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai progam kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kepada Bupati dengan tembusa kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa	a. Konsep : Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum partisipatif di tingkat desa di Indonesia, di mana masyarakat bersama pemerintah desa berdiskusi untuk merencanakan pembangunan desa. Konsepnya melibatkan partisipasi aktif warga dalam menentukan prioritas pembangunan di desa. b. Formulasi Perhitungan : Pelaksanaan Musrenbang Desa diikuti oleh unsur Tim Kecamatan, Pemerintah Desa,	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	

			Lembaga kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat. Dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Nganjuk. c. Manfaat : • Meningkatkan keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan desa. • Memastikan bahwa prioritas pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. • Membuka ruang untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan desa. • Memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam mengambil keputusan terkait pembangunan desa.		
		Jumlah Desa yang aktif mengikuti Musrenbang Kecamatan	a. Konsep : Dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Nganjuk dengan peserta terdiri dari unsur Tim Musrenbang Tingkat Kabupaten, Tim Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan desa dan dilaksanakan satu hari sesuai jadwal dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. b. Manfaat : • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. • Melibatkan desa-desa secara langsung dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan lokal.		

			• Desa yang aktif mengikuti Musrenbang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prioritas pembangunan dan sumber daya yang tersedia. • Mendorong kerjasama antara desa-desa dalam mencapai tujuan pembangunan kecamatan.		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

S I K I N, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19681202 199003 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Tugas : Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang – undangan

Fungsi :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasi dan/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Situasi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dinamis dan	Pembinaan linmas	a. Formulasi Perhitungan : Jumlah pelayanan administrasi PATEN yang ditangani b. Manfaat : Menentukan manfaat atau tujuan dari pengumpulan data	Seluruh Desa dan Kelurahan	

	kondusif		ini. Misalnya, manfaatnya bisa untuk mengevaluasi efisiensi kinerja kantor paten, mengidentifikasi tren dalam penanganan paten, atau memahami beban kerja petugas paten.		
		Monitoring kegiatan siskampling	a. Konsep : Monitoring kegiatan siskampling mencakup pemantauan sistematis terhadap seluruh proses sampling. Fokus utama adalah memastikan bahwa sampling dilakukan dengan akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. b. Formulasi Perhitungan : Formulasi perhitungan dapat mencakup parameter seperti tingkat keberhasilan sampling, deviasi dari target, atau tingkat keakuratan sampel. c. Manfaat : • Memastikan kualitas produk atau data yang dihasilkan dari kegiatan sampling. • Mencegah kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat merugikan proses produksi atau penelitian. • Mendukung pemantauan dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses sampling.	Seluruh Desa dan Kelurahan	
		Pelaporan periodic ipoleksosbud, dan laporan cepat kejadian khusus	a. Konsep : Pelaporan periodic ipoleksosbud adalah proses menyusun dan menyajikan informasi terkait industri, pertanian, kependudukan, sosial, dan budaya pada interval waktu tertentu.	Seluruh Desa dan Kelurahan	

			b. Manfaat : • Pemantauan dan Evaluasi: Memantau kinerja sektor-sektor tersebut secara berkala. • Perencanaan Strategis: Membantu dalam perencanaan jangka panjang dan perbaikan kebijakan. • Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat c. Formulasi Perhitungan : Diukur dengan jumlah laporan Ipoleksosbud		
2.	Situasi Keamanan Kantor	Pembinaan Penjaga Kantor	a. Konsep : • Konsep pembinaan penjaga kantor melibatkan upaya untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan profesionalisme penjaga kantor. • Fokus pada pelatihan, evaluasi kinerja, serta penerapan tindakan korektif dan pencegahan. b. Manfaat : • Meningkatkan keamanan kantor dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan. • Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penjaga kantor. • Memberikan rasa aman kepada karyawan dan pengunjung.	Personil Penjaga Kantor	

			c. Formulasi Perhitungan : Jumlah jam pelatihan yang diikuti oleh semua penjaga kantor		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SEKSI KETRENTAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

LIS PRADNYA PARAMITASARI
Penata Tingkat I
NIP. 19670427 199003 2 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan

Fungsi :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa;
g. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
j. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
k. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
l. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Peningkatan kinerja pemerintah desa dan tata kelola keuangan desa yang transparan dan	Pembinaan perangkat desa	a. Konsep : Pembinaan perangkat desa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kinerja perangkat desa dalam	Ka Sie Binwas	

	akuntabel		menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b. Formulasi Perhitungan : • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat diukur dengan menghitung persentase peserta pelatihan yang berhasil melewati evaluasi. • Peningkatan kinerja dapat diukur dengan mengukur peningkatan produktivitas atau efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin perangkat desa. c. Manfaat : • Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa. • Memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. • Mendorong inovasi dan pengembangan kapasitas dalam tata kelola desa.		
		Pelaksanaan musyawarah desa (Musdes) tentang RPJMDes, APBDes, ADD/DD	a. Konsep : • Musyawarah Desa adalah forum partisipatif yang melibatkan warga desa untuk mengambil keputusan bersama terkait pembangunan desa. • RPJMDes merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merinci visi, misi, dan program pembangunan desa. • APBDes adalah dokumen anggaran yang mengatur pendapatan dan pengeluaran desa untuk satu tahun anggaran. • ADD/DD adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mendukung pembangunan desa. b. Formulasi Perhitungan :	Ka Sie Binwas	

			• Perhitungan RPJMDes melibatkan identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan, serta alokasi sumber daya yang tersedia. • Perhitungan APBDes mencakup proyeksi pendapatan desa dari berbagai sumber, seperti pajak, hasil usaha desa, dan dana alokasi. c. Manfaat : • Partisipasi aktif masyarakat dalam Musdes meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program pembangunan. • RPJMDes memberikan arah strategis untuk pembangunan desa dalam jangka menengah. • APBDes memastikan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

ASTININGRUM OKTAVIA, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19851006 201101 2 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan

Fungsi :
a. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
b. Pengorganisasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan intansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
c. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugasdan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
d. Pengorganisasian dengan satuan kerja perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
f. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan (KTP, KK dan Mutasi)	a. Konsep : Jumlah laporan kependudukan mengacu pada total laporan yang diterima atau diproses oleh suatu entitas terkait dengan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Mutasi Kependudukan. Konsep ini mencakup semua jenis laporan terkait informasi kependudukan. b. Manfaat :	Seksi Tata Pemerintahan	

			• Manfaat dari mengumpulkan dan menganalisis jumlah laporan kependudukan melibatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika populasi, perencanaan kebijakan, pemantauan perkembangan demografis, dan pemenuhan kebutuhan administratif terkait kependudukan. Data ini juga dapat digunakan untuk membuat proyeksi populasi dan mengidentifikasi tren demografis. c. Cara Pengumpulan Data : • Penggunaan sistem informasi terkomputerisasi untuk mendokumentasikan dan melacak laporan kependudukan. • Melakukan survei langsung atau wawancara dengan individu atau keluarga untuk mengumpulkan informasi kependudukan. • Mengumpulkan data secara rutin dari sumber - sumber yang sudah ada, seperti kantor catatan sipil atau lembaga pemerintah terkait.		
2.	Tertib Pelayanan Kependudukan	Jumlah Kelancaran Pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, dan Mutasi)	a. Konsep : Konsep kelancaran pelayanan administrasi kependudukan mencakup sejumlah indikator kinerja yang mengukur seberapa efisien dan efektif proses penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan proses mutasi kependudukan. Kelancaran pelayanan mencerminkan kemampuan instansi terkait dalam memberikan layanan administrasi kependudukan secara cepat, akurat, dan efisien	Desa dan Kelurahan	

			b. Formulasi Perhitungan : Efisiensi Pelayanan = Jumlah Pelayanan Diselesaikan X 100% Jumlah Waktu yang Diperlukan c. Manfaat : • Peningkatan kelancaran pelayanan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap administrasi kependudukan. • Membantu instansi terkait untuk mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck dalam proses pelayanan. • Memberikan dasar data untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan strategis terkait administrasi kependudukan. d. Cara Pengumpulan Data : • Mengumpulkan data secara rutin dari sumber - sumber yang sudah ada, seperti kantor catatan sipil atau lembaga pemerintah terkait.		
3.	Tertib administrasi pelayanan perizinan	Jumlah pelayanan administrasi PATEN yang ditangani	a. Konsep : Konsep kelancaran pelayanan administrasi PATEN untuk kelancaran pelayanan masyarakat mencerminkan kemampuan instansi terkait dalam memberikan layanan administrasi PATEN kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan efisien b. Formulasi Perhitungan : Jumlah pelayanan administrasi PATEN yang ditangani c. Manfaat : • Menentukan manfaat atau tujuan dari pengumpulan data ini. Misalnya, manfaatnya bisa	Desa dan Kelurahan	

			untuk mengevaluasi efisiensi kinerja kantor paten, mengidentifikasi tren dalam penanganan paten, atau memahami beban kerja petugas paten.		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

RULLY HATMANTO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19730323 199602 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Tugas : Melaksanakan pembayaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan masing – masing

Fungsi :
a. Melaksanakan pencatatan semua bukti pengeluaran ke dalam buku penerimaan harian;
b. Menghimpun, mengklarifikasi data, menggandakan bukti pengeluaran sebagai kelengkapan penyusunan SPJ;
c. Menyiapkan data guna kelengkapan dalam pengajuan SPP Gaji, SPP LS dan GU;
d. Menerima dan mendistribusikan pencairan anggaran, kegiatan GU dan Kegiatan LS;
e. Membantu mempersiapkan data guna kelengkapan SPJ;
f. Membantu dan Menyusun laporan bulanan keadaan keuangan;
g. Membuat dan Menyusun laporan akhir keuangan.
h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi keuangan yang benar	Laporan keuangan yang benar	a. Konsep : Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan mencakup aspek-aspek seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya b. Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan keuangan yang benar. c. Manfaat :	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

			• Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) seperti investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya. • Memungkinkan analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan. • Alat untuk pengambilan keputusan yang efektif.		

Mengetahui :
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

MAYA DEVIANTI DYAH PANCARI, SE, M.AP.
Penata
NIP. 19741231 201408 2 002

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

SUYATININGSIH
Pengatur Tingkat I
NIP. 19680913 200901 2 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

Tugas : Melaksanakan pengadministrasian surat menyurat

Tugas :
a. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi;
b. Mengklarifikasikan surat/berkas/dokumen yang masuk dan keluar ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Mengarsipkan dokumen ke dalam file surat masuk sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi umum yang benar	Jumlah kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan	a. Konsep : • Kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen administrasi didasarkan pada konsep pengelolaan informasi yang terstruktur dan teratur. Ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan penyimpanan data administratif sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. • Melaksanakan administrasi Absensi PNS dan TPP b. Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen administrasi yang benar	Buku register surat	

			c. Manfaat : • Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi administratif. • Menjamin akurasi data yang dicatat dan didokumentasikan. • Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. • Menciptakan rekam jejak Absensi yang lengkap untuk kelengkapan dokumen TPP		

Mengetahui :
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUPRIADI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19730518 199703 1 004

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI UMUM

BAGONG MUNDOKO
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19691105 199302 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Tugas : a. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian

Fungsi :
a. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaaaikan Berkala, Pensiun dan Cuti
b. Mengarsipkan dokumen Kepegawaian ke dalam file dokumen kepegawaian sesuai dengan pengkodean atau tata naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan untuk memudahkan dalam pengendalian dokumen;
c. Membuat DUK Kepegawaian sesuai tugas pokok fungsi ASN dan sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi kepegawaian yang benar	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan	d. Konsep : Kegiatan pengusulan dokumen administrasi kepegawaian didasarkan pada konsep pengelolaan informasi yang terstruktur dan teratur. Ini melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, pengusulan, turunnya SK dan penyimpanan dokumen administratif kepegawaian sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. e. Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen kepegawaian yang benar dan sesuai aturan yang berlaku	Buku register administrasi kepegawaian	

			f. Manfaat : • Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan. • Menjamin akurasi data yang dicatat dan didokumentasikan. • Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. • Menciptakan rekam jejak yang lengkap untuk referensi dan audit.		

Mengetahui :
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUPRIADI, SE.
Penata Tingkat I
NIP. 19730518 199703 1 004

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SUDARTI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19670302 200701 2 031

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan pemerintahan, waris dan pelayanan masyarakat di Kecamatan

Fungsi :
a. Melaksanakan pelayanan pemerintahan dan waris kepada masyarakat;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi pemerintahan yang benar	Jumlah dokumen pelayanan pemerintahan dan waris	a. Konsep : Dokumen pelayanan pemerintahan dan waris yang harus diselesaikan dengan baik b. Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen pelayanan pemerintahan yang selesai tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. c. Manfaat : • Memberikan pelayanan pemerintahan yang baik kepada masyarakat	Kasi Ketentraman, ketertiban dan Pemerintahan Umum	

			• Menghimpun dokumen waris masyarakat yang harus diselesaikan • Menyediakan laporan data pemerintahan		

Mengetahui :
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

LIS PRATNYA PARAMITASARI
Penata Tingkat I
NIP. 196730427 199003 2 005

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NURYASIN
Pengatur
NIP. 19670115 200701 1 017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan

Fungsi :
a. Melaksanakan pelayanan kependudukan kepada masyarakat;
b. Melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan pelayanan kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen pelayanan kependudukan dan pemerintahan	a. Konsep : Dokumen pelayanan kependudukan diantaranya adalah e-KTP, pengantar KK, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat pengantar pindah/datang dan surat keterangan domisili b. Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen pelayanan kependudukan yang benar.	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

			c. Manfaat : • Memberikan pelayanan kependudukan yang baik kepada masyarakat • Menghimpun data kependudukan warga masyarakat • Menyediakan laporan data kependudukan		

Mengetahui :
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

RULLY HATMANTO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19730518 199703 1 004

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN

AGUS SUNYOTO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19720324 200701 1 017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan kependudukan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan

Fungsi :
a. Melaksanakan pelayanan kependudukan kepada masyarakat;
b. Melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan pelayanan kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Tertib administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen pelayanan kependudukan	a. Konsep : Dokumen pelayanan kependudukan diantaranya adalah e-KTP, pengantar KK, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat pengantar pindah/datang dan surat keterangan domisili b. Formulasi Perhitungan : Jumlah dokumen pelayanan kependudukan yang benar. c. Manfaat : • Memberikan pelayanan kependudukan yang baik kepada masyarakat	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

			• Menghimpun data kependudukan warga masyarakat • Menyediakan laporan data kependudukan		

Mengetahui :
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

RULLY HATMANTO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 19730518 199703 1 004

Nganjuk, 22 Desember 2023
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ADI KUSCAHYONO
Pengatur Tingkat I
NIP. 19710214 200906 1 001

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH JATIREJO

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Jatirejo dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Jatirejo
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Jatirejo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Jatirejo	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Jatirejo. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website “e-sukma jatim” d. Manfaat IKM	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Jatirejo. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Jatirejo dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanJatirejo yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Jatirejo	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirejo	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat

			c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Jatirejo	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Jatirejo. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Jatirejo, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan		Kasi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas.		Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH JATIREJO

SUNARYO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19670327 199202 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH BEGADUNG

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Begadung dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Begadung
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Begadung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Begadung	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Begadung • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Begadung f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Kramat dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan		

			di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Begadung yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Begadung	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Begadung	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Begadung	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Kramat. • Pelaksanaan tugas dan fungsi		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			pemerintahan di tingkat Kelurahan Kramat, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Nganjuk, 22 Desember 2023

CAMAT NGANJUK

HARI MOERTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

LURAH BEGADUNG

TRI SETYO WAHYUNI, SE
Penata Muda TK. I
NIP. 19740729 200701 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : LURAH BOGO

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Bogo dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Bogo
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Bogo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Bogo	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kelurahan Bogo. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Bogo. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Bogo dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bogo yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Bogo	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		

		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bogo	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bogo	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Bogo. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Bogo, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			• Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :

CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Bogo, 22 Desember 2023

LURAH BOGO

SEMIANTO, SE
Penata Muda Tingkat 1
NIP. 19730426 200701 1 011

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH GANUNGKIDUL

Tugas : a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Ganungkidul dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Ganungkidul
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Ganungkidul	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Ganungkidul	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Ganungkidul. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Ganungkidul. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Ganungkidul dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan

	Ganungkidul yang baik	Ganungkidul	meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Ganungkidul yang terlaksana dengan baik. d. Manfaat IKM • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah		Pelayanan Publik

			f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ganungkidul	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Ganungkidul	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Ganungkidul. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Ganungkidul, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya.		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan Mengukur jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat yang terselenggara dengan baik d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :
KECAMATAN NGANJUK
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH GANUNGKIDUL

KUSMINDAR, S.E
Penata Tingkat I
NIP. 19670204 199202 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH KARTOHARJO

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Kartoharjo dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Kartoharjo
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Kartoharjo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Kartoharjo	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kartoharjo. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Kartoharjo. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Kartoharjo dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kartoharjo yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Kartoharjo	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kartoharjo	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Kartoharjo	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Kartoharjo. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Kartoharjo, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dg standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan peristiwa tertentu		

Mengetahui :

CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Kartoharjo, 22 Desember 2023

LURAH KARTOHARJO

MUHAMAD KUSNUN AFANDI, S.Sos
Penata Muda Tingkat 1
NIP. 19700710 200901 1 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH KAUMAN

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Kauman dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Kauman
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Kauman	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Kauman	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kauman. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Kauman. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Kauman dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kauman yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Kauman	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. Manfaat IKM • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		

		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			• Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Kauman	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Kauman. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Kauman, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan.		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			peristiwa tertentu		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.Ap
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH KAUMAN

AGUNG EVENDY, S.STP.,M.Si
Penata
NIP. 19930920 201507 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN :

1. LURAH KRAMAT

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Kramat dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Kramat
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Kramat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Kramat	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Kramat. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Kramat. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Kramat dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kramat yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Kramat	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan.		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kramat	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			• Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Kramat	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			• Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Kramat. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Kramat, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		

		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Nganjuk, 22 Desember 2023

CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

LURAH KRAMAT

SUHADI, SE
Penata Muda TK. I
NIP. 19740513 200701 1 025

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : LURAH MANGUNDIKARAN

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Mangundikaran dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Mangundikaran
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Mangundikaran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Mangundikaran	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Mangundikaran. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelur Kasi Pemerintahan Pelayanan Publik

			yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2022 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Mangundikaran. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Mangundikaran dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangundikaran yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Mangundikaran	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan d Ka Sie Pemerintahan d Pelayanan Publik

			digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. Manfaat IKM • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangundikaran	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator		Ka Sie Pemberdayaa Masyarakat

			seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Mangundikaran	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Mangundikaran.		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			• Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Mangundikaran, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat.		Ka Sie Pemerintahan d Pelayanan Publik

			• Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui,
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH MANGUNDIKARAN

PURWO HADI SETIYO WICAKSONO, S.STP
Penata
NIP. 19900910 201206 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH PAYAMAN

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Payaman dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Payaman
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Payaman	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Payaman	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Payaman. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Payaman. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Payaman dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		

2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Payaman yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Payaman	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik.		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Payaman	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal.		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			• Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Payaman	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Payaman. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Payaman, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi.		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH PAYAMAN

MOH. ZAINI, SE
Penata
NIP. 19690820 199803 1 009

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH PLOSO

1. LURAH PLOSO

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Ploso dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Ploso
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Ploso	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Ploso	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Ploso. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Ploso. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Ploso dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ploso yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Ploso	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		

		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ploso	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data		Penanggungjawab Kasi Pemberdayaan Masyarakat

			• Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Ploso	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Ploso. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Ploso, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan.		Penanggungjawab Kasi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data		Penanggungjawab Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Nganjuk, 29 Desember 2023

Mengetahui,
CAMAT NGANJUK,

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19780503 199711 1 001

LURAH PLOSO

ASWIN NIZAMIAR, S.Sos
Penata Muda Tk.I
NIP. 19860224 201001 1 014

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH RINGINANOM

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Ringinanom dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Ringinanom
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Ringinanom	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Ringinanom	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Ringinanom. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Ringinanom. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Ringinanom dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		

2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ringinanom yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Ringinanom	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan KaSi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ringinanom	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.		KaSi Pemberdayaan Masyarakat

			• Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Ringinanom	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antar unit pemerintahan Kelurahan Ringinanom. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Ringinanom, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			• Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat.		Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH RINGINANOM

MUKSAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19710306 199401 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK

JABATAN : LURAH WERUNGOTOK

Tugas :
a. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah Kelurahan Werungotok dan kebutuhan daerah;
b. Melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan Werungotok
b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan Werungotok	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM di Kelurahan Werungotok	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan public di Kelurahan Werungotok. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik.	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			• Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik" c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kelurahan Werungotok. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM Kelurahan Werungotok dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Werungotok yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Werungotok	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil		Penanggungjawab Sekretaris Kelurahan dan Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan : Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik : Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan : Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. c. Formulasi Perhitungan d. **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah		

			f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Werungotok	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan		Ka Sie Pemberdayaan Masyarakat

			pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan Werungotok	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat Kelurahan Werungotok untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan Kelurahan Werungotok. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat Kelurahan Werungotok, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya.		Ka Sie Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum : Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.		Ka Sie Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH WERUNGOTOK

YUDI SANTOSO, ST.
Penata
NIP. 19730720 200312 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024 – 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGANJUK
JABATAN : LURAH CANGKRINGAN

Tugas :
a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
b. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Fungsi :
a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di tingkat Kelurahan.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik hasil SKM	a. Konsep IKM : • IKM mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. • IKM dapat melibatkan berbagai aspek, seperti responsivitas, keandalan, kecepatan, keterbukaan, dan sebagainya. b. Definisi Operasional • Komponen-komponen IKM dapat dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengukur aspek-aspek tertentu dari pelayanan publik. • Contoh pertanyaan operasional: "Seberapa puas Anda dengan waktu respon pelayanan publik?" atau "Seberapa yakin Anda dengan kehandalan pelayanan publik?"	Laporan IKM	Penanggungjawab Sekretariat, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			c. Formulasi Perhitungan IKM • IKM dapat dihitung dari Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mulai pada tahun 2021 diukur menggunakan website "e-sukma jatim" d. Manfaat IKM • Memberikan umpan balik kepada penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. • Memungkinkan perbandingan kinerja antar lembaga atau instansi. • Memberikan gambaran tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner yang diwujudkan dalam bentuk barcode dan di edarkan kepada Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Kecamatan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Frekusensi Waktu Pengumpulan data pada IKM ialah dilakukan secara berkala yakni setiap tribulan dan di akumulasi pada akhir tahun.		
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Konsep : • Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah suatu kondisi di mana instansi pemerintah dan lembaga publik berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. b. Definisi Operasional • Efisiensi Pemerintahan: Rasio antara output yang dihasilkan oleh pemerintah dengan sumber daya yang digunakan. • Efektivitas Pelayanan Publik: Capaian tujuan pelayanan publik dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. • Kualitas Pelayanan: Ukuran yang mencakup responsivitas, keadilan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang		Penanggungjawab Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			diberikan. c. Formulasi Perhitungan **Efektivitas = Capaian Tujuan / Tujuan yang ditetapkan** d. Manfaat IKM • Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan efisien, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. • Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya. • Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengelola sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. e. Cara Pengumpulan Data • Melibatkan evaluasi internal terhadap proses dan kinerja organisasi pemerintah f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Dapat dilakukan secara periodik, misalnya setiap tahun, setiap semester, atau setiap triwulan		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	a. Konsep : • Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan b. Definisi Operasional • Pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, percepatan pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan lembaga masyarakat. c. Formulasi Perhitungan • Mengukur tingkat partisipasi masyarakat, rumus yang dapat digunakan adalah jumlah partisipasi aktif dibagi dengan		Penanggungjawab Ka Si Pemberdayaan Masyarakat Desa

			jumlah anggota masyarakat d. Manfaat IKM • Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. • Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan lokal. • Perbaikan infrastruktur dan layanan publik. • Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengatasi masalah lokal. • Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. e. Cara Pengumpulan Data • Analisis dokumen terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Setiap enam bulan atau setahun sekali, tergantung pada kebutuhan dan sifat program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan		
		Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelurahan	a. Konsep : • Peningkatan koordinasi antarunit atau lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Definisi Operasional • Peningkatan frekuensi pertemuan, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarunit pemerintahan kecamatan. • Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan administrasi. c. Formulasi Perhitungan • Menggunakan indikator seperti jumlah pertemuan koordinasi, tingkat partisipasi unit pemerintahan dalam pertemuan tersebut, atau indikator lain yang relevan. d. Manfaat IKM • Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan		Penanggungjawab Ka Si Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

			pemerintahan. • Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan. • Mengurangi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya. e. Cara Pengumpulan Data • Mengamati langsung pertemuan dan interaksi antarunit pemerintahan. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Disesuaikan dengan jadwal kegiatan pemerintahan dan kebutuhan penelitian		
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Camat	a. Konsep : • Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum: Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Camat. b. Definisi Operasional • Rasio output terhadap input dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum. • Persentase pencapaian target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh Camat. • Proses dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum sesuai dengan standar akuntabilitas. c. Formulasi Perhitungan • (Sasaran atau target tercapai) / (Sasaran atau target yang ditetapkan) * 100% d. Manfaat • Meningkatkan kualitas layanan publik. • Mempercepat pengambilan keputusan. • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. • Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. e. Cara Pengumpulan Data • Melakukan pemantauan langsung terhadap proses		Penanggungjawab Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

			penyelenggaraan urusan pemerintahan umum f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data • Saat terjadi perubahan signifikan atau peristiwa tertentu		

Mengetahui :
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

Nganjuk, 22 Desember 2023
LURAH CANGKRINGAN

DIDIK HENDRA KURNIAWAN, S.E.
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19870803 201001 1 008